



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

OPTIMALISASI LAYANAN DAN TARGET KEPESERTAAN PBI BPJS KESEHATAN

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 6–8 Maret 2024, International Social Security Association (ISSA) menyelenggarakan *The 17th ISSA International Conference on Information and Communication Technology in Social Security (ICT 2024)* di Bali. Dalam forum tersebut, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempresentasikan kecanggihan sistem informasi yang dikelola BPJS Kesehatan dan keberhasilan optimalisasi keanggotaan yang mencapai 268,7 juta atau 96,8% dari jumlah penduduk per 1 Maret 2024 (jauh melampaui target keanggotaan tahun 2023 yang sebesar 91%).

BPJS Kesehatan adalah lembaga di bawah presiden yang bertugas melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI). Berkaitan dengan optimalisasi layanan bagi peserta PBI, ada masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan memerlukan solusi. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, per 31 Desember 2023, jumlah peserta yang tidak aktif membayarkan iuran cukup banyak (53,7 juta peserta) termasuk di dalamnya sejumlah peserta PBI yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial karena dianggap sudah tidak termasuk kategori miskin dan kurang mampu. Yang menjadi masalah, peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut sering tidak mengetahui bahwa status mereka telah dinonaktifkan. Mereka baru mengetahui ketika berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengaktifan kembali keanggotaan PBI tidak dapat dilakukan secara otomatis. Peserta yang dinonaktifkan harus terlebih dahulu membawa sejumlah dokumen yang dibutuhkan ke dinas sosial kabupaten/kota. Setelah dokumen dicek dan disesuaikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) baru dinas sosial akan mengeluarkan surat keterangan yang ditujukan pada Kepala Cabang BPJS Kesehatan untuk permohonan pengaktifan kembali. BPJS kemudian akan mengaktifkan kartu sehingga dapat digunakan kembali. Dalam pelaksanaannya, kartu belum tentu dapat langsung digunakan. Menurut Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), peserta PBI harus menunggu satu bulan hingga status kepesertaannya aktif baru dapat menerima pelayanan kesehatan dari BPJS. Oleh karenanya, sangat penting informasi penonaktifan sampai kepada peserta sehingga peserta dapat mengurus pengaktifan kembali tanpa menunggu sakit.

BPJS Kesehatan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan penonaktifan kepada peserta. Hal ini diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (Inpres No. 1 Tahun 2022). BPJS Kesehatan menyatakan telah secara rutin memberikan pemberitahuan status tidak aktif kepada peserta, mulai dengan sistem *blast*, bersurat melalui pos, dan lewat pemerintah daerah yang menyampaikan kepada desa sampai RT/RW setempat. Upaya BPJS itu sepertinya kurang efektif karena dalam prakteknya masih ada peserta PBI yang tidak mengetahui bahwa status kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan sistem jaminan sosial yang dikelolanya BPJS Kesehatan perlu membuat sistem yang menjamin informasi kepesertaan dapat diterima langsung oleh peserta.

Masalah lainnya dari PBI adalah masih belum optimalnya jumlah kepesertaan, seharusnya berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, keanggotaan PBI ditargetkan mencapai 111 juta di tahun 2023 dan 113 juta orang di tahun 2024. Target 2023 tentunya sudah tidak tercapai karena keanggotaan PBI per 31 Januari 2024 sejumlah 96.751.302, hendaknya target kepesertaan PBI di tahun 2024 dapat tercapai.

BPJS Kesehatan hendaknya juga memiliki program optimalisasi keanggotaan yang ditujukan bagi PBI. Keanggotaan PBI dapat dioptimalkan dengan mengampunahkan proses pendaftaran BPJS PBI kepada keluarga miskin dan tidak mampu. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa salah satu peran dari BPJS Kesehatan adalah meningkatkan kampanye dan sosialisasi program jaminan kesehatan nasional.

Atensi DPR

Dalam rangka optimalisasi layanan dan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong BPJS Kesehatan untuk membangun sistem pemberitahuan penonaktifan kepesertaan yang dapat diterima secara langsung dan cepat oleh peserta PBI.
2. Mendorong BPJS Kesehatan melakukan kampanye dan sosialisasi terkait proses pendaftaran peserta PBI kepada keluarga miskin dan tidak mampu.
3. Mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan pada proses pengaktifan kembali keanggotaan PBI dan kegiatan kampanye kepesertaan PBI.

Sumber

bisnis.com, 6 Maret 2024;
bpjs-kesehatan.go.id, 10 Maret 2024;
finansial.bisnis.com, 2 Oktober 2023;
kompas.com, 16 November 2023;
Kompas, 7 Maret 2024; dan
Media Indonesia, 7 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024